

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Laporan keuangan ialah suatu tulisan penjelasan informasi keuangan sebuah perusahaan di sebuah fase periode akuntansi yang bisa dimanfaatkan agar mendeskripsikan prestasi kerja pada suatu perusahaan. Tujuan laporan keuangan yaitu untuk membagikan suatu keterangan terkait kinerja, situasi keuangan dan peralihan situasi keuangan (IAI, 2018). Laporan keuangan bisa juga jadi standar untuk bagian intern ataupun eksternal guna mengevaluasi prestasi kerja untuk sebuah perusahaan. Laporan keuangan bisa digunakan menjadi panduan untuk pengguna laporan keuangan eksternal perusahaan contohnya misal investor, menjadi landasan penentuan ketetapan. Satu diantara konstituen yang amat krusial pada laporan keuangan yakni laporan laba/rugi. Laporan laba/rugi ialah satu dari tiga laporan keuangan yang dipakai guna memberitahukan keuangan sebuah perusahaan sepanjang satu periode, beserta sama neraca keuangan serta laporan arus kas. Laporan tersebut adalah laporan awal yang amat biasa sebab data yang diperlukan jelas, simpel dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Contoh data yang paling penting yaitu laba, dari laba dapat diketahui performa perusahaan setiap tahunnya.

Bersumber dari PSAK (*Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*) No.1 mengenai kinerja manajemen diukur menggunakan informasi laba sebagai indikatornya. Adanya indikator tersebut membuat manajemen termotivasi untuk mencapai tujuan perusahaan secara maksimal, akan tetapi meningkatnya laba perusahaan belum tentu terlepas dari kecurangan pada laporan keuangan. Pernyataan Standar Audit (PSA) no. 70 menjelaskan terkait penyelewengan pelaporan keuangan adalah penghilangan yang dilangsungkan dengan terencana atau tidak terencana untuk besaran terpilih ataupun penyingkapan di laporan keuangan dengan maksud mengelabui pemakai laporan keuangan yang menghasilkan ketidaksesuaian laporan keuangan. Sugiartono (2009), skandal tersangkut kecurangan untuk laporan keuangan

kerap dihubungkan terhadap dengan rapuhnya implementasi manajemen perusahaan, serta separuh pendapat umum menyatakan kasus keuangan merupakan indikasi, serta hasil atas kelemahan tinggi dari perusahaan serta pemerintahan. Melainkan daripada itu, bahaya penyelewengan teramat tinggi berlangsung pada tingkatan manajemen senior lantaran jalan masuk yang mereka punya kepada aset serta otoritas agar melintasi pengelolaan teramat tinggi di taraf tersebut. Satu diantara perkara yang sudah berlangsung di Indonesia yaitu kasus di dunia perbankan nasional pada PT Bank Bukopin Tbk, dengan cara memodifikasi atau mengubah laporan keuangan, yang menimbulkan posisi kredit serta penghasilan berdasar komisi bukopin meningkat tidak sewajarnya. Bank Bukopin melakukan perubahan laba bersih pada tahun 2016 jadi Rp 183,5 Miliar yang sebelumnya berjumlah Rp 1,08 Triliun, lalu penyusutan paling besar terjadi pada bagian penghasilan provisi serta komisi yang mewujudkan penghasilan atas kartu kredit yaitu sebesar Rp 317,8 Miliar yang sebelumnya berjumlah Rp 1,06 Triliun. Selain dari permasalahan kartu kredit, perubahan pula berlangsung untuk pembiayaan anak usaha Bank Syariah Bukopin (BSB) mengenai peningkatan saldo cadangan kerugian penyusutan nilai debitur, perubahan tersebut mengakibatkan tanggungan eliminasi kerugian nilai untuk aset keuangan menimbulkan peningkatan sebesar Rp 797,6 Miliar yang sebelumnya berjumlah Rp 649,05 Miliar, keadaan tersebut mengakibatkan tanggungan perseroan bertambah Rp 148,6 Miliar (Cncb Indonesia, 2018).

Peristiwa kecurangan dengan memanipulasi laporan keuangan yang kerap berlangsung pada masa modern saat ini, harus ada sebuah sistem dengan prosedur yang baik untuk mengurangi tindakan kecurangan laporan keuangan yang kerap dinyatakan yakni *Good Corporate Governance*. Bersama terdapatnya sistem manajemen perusahaan yang didukung oleh prosedur, diharapkan dapat mengatasi krisis keuangan ataupun non-keuangan perusahaan dan mampu menaikkan efektivitas dan efisiensi dari pengelolaan bisnis perusahaan.

Khairandy dan Malik (2007), menjelaskan tentang *corporate governance* merujuk kepada sebuah metode yang telah dibentuk oleh perusahaan. Prosedur tersebut berisikan bukti-bukti bahan tentang kondisi investor serta membantu investor

dalam mengambil keputusan yang efektif untuk perusahaan. Hal tersebut membuat *good corporate governance* dibutuhkan agar mencegah manajer melangsungkan sebuah penyelewengan proses laporan keuangan.

Pemicu berlangsungnya penyelewengan laporan keuangan salah satunya sebab rapunya sistem korporasi pada perusahaan. Perusahaan dengan sistem korporasi yang lemah berpotensi tinggi terjadinya kecurangan pelaporan keuangan. Bersumber pada Skousen *et al.*, (2009) peristiwa penyelewengan terbesar yakni kepada perusahaan yang menggunakan sistem *corporate governance* perusahaan yang rapuh. Menurut Salim (2017) sebagian prosedur *corporate governance*, contoh prosedur internal yakni dewan komisaris dan prosedur eksternal yaitu komite audit dan kepemilikan institusional diharapkan dapat mengatasi masalah keagenan dan dapat juga meminimalisir berlangsungnya kecurangan pada laporan keuangan.

Dalam rangka memotivasi perusahaan publik supaya mengimplementasikan manajemen perusahaan yang bagus, pemerintah dan para regulator lainnya telah mengeluarkan berbagai macam peraturan mengenai pelaksanaan tata kelola perusahaan, satu diantaranya yakni Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 Terkait Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Dengan diterapkannya tata kelola yang tepat, dicita-citakan mekanisme kontrol dalam perusahaan bakal berjalan secara sendirinya, sehingga perusahaan dapat memberikan perfoma yang baik yang nantinya akan tercermin pada laporan keuangan dan tahunan perusahaan.

Peraturan lainnya adalah Ketetapan Direksi BEI Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004 Terkait Peraturan Nomor I-A Terkait Pencatatan Saham serta Efek Bersifat Ekuitas di Bursa. Regulasi tersebut menyebutkan mengenai perusahaan diharuskan memiliki anggota independen pada struktur Dewan Komisaris serta Direksi, Komite Audit, serta Sekretaris Perusahaan. Berkaitan dengan Dewan Komisaris, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Terkait Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa sebuah perusahaan publik mempunyai tiga Organ Perseroan, ialah RUPS, Direksi, serta Dewan Komisaris. Ketiga Organ itu dengan berbarengan melangsungkan fungsi serta kewajibannya tiap-tiap supaya memperoleh target perusahaan. Meskipun RUPS merupakan Organ Perseroan tertinggi, tugas serta

Arief Mulyadianto, 2020

PERANAN CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENGURANGI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

tanggung jawab yang dibagikan pada Dewan Komisaris memiliki dampak sangat besar terhadap kegiatan yang dilakukan perusahaan. Dengan kata lain, kinerja yang dibagikan dari Dewan Komisaris akan menentukan apakah perusahaan telah menerapkan tata kelola perusahaannya secara baik.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Terkait Perseroan Terbatas mengemukakan mengenai fungsi pokok Dewan Komisaris adalah melaksanakan fungsi pengawasan serta memberi nasihat untuk penyelenggaraan perseroan yang dilakukan oleh Direksi. Hsu dan Wu (2014) menyebutkan bahwa efektivitas kinerja dari Dewan Komisaris akan menentukan dan memengaruhi kesuksesan dari sebuah perusahaan. Hal ini dikarenakan Dewan Komisaris harus dapat memastikan perusahaan berjalan sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Volonté, 2015).

Ketika melakukan tugasnya, Dewan Komisaris bisa didukung dari beberapa komite, salah satunya yakni Komite Audit. Komite Audit ialah komite yang bertindak secara tidak terikat serta memiliki tanggung jawab terhadap Dewan Komisaris untuk mendukung melangsungkan peran serta kewajiban Dewan Komisaris. Pada kaitannya dengan kesempatan berlangsungnya kecurangan pada laporan keuangan, prestasi kerja Komite Audit punya pengaruh yang cukup besar kepada peluang terjadinya salah catat atau *misstatement* pada laporan keuangan (Veronica dan Bachtiar, 2005). Keadaan tersebut dikarenakan Komite Audit memiliki peranan yang teramat krusial untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap informasi keuangan yang bakal diinformasikan dari perusahaan (Ketetapan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-643/BL/2012).

Keberadaan Komite Audit dalam perusahaan juga terbukti dapat meminimalisasi terjadinya kecurangan pada laporan keuangan. (Kusumawati dan Hermawan, 2013), sehingga bisa menambahkan integritas atas laporan keuangan yang dibuat perusahaan (WanMohd Razali dan Arshad, 2014). Kondisi yang serupa pula dinyatakan pada riset yang dilaksanakan Arbott *et al* (2004), dimana Komite Audit memiliki korelasi negatif yang signifikan kepada terjadinya *restatements* dalam laporan keuangan.

Komite Audit pula perlu mempunyai keilmuan pada aspek keuangan ataupun mempunyai dasar akuntansi. Bersumber pada Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015, anggota komite audit mempunyai syarat independen serta sedikitnya ada seorang yang mempunyai keahlian pada aspek keuangan ataupun akuntansi. Melainkan daripada itu anggota komite audit harus mengetahui laporan keuangan, bisnis perusahaan spesifiknya yang berhubungan pada pelayanan jasa ataupun aktivitas bisnis emiten ataupun perusahaan publik, proses audit, manajemen risiko, serta kebijakan perundang-undangan di sektor pasar modal dan kebijakan perundang-undangan mengenai lain-lain.

Anisa dan Andri (2012) dan Prasetyo (2014) mengungkapkan pada saat makin banyak anggota komite audit yang mempunyai keilmuan akuntansi serta keuangan kemudian mengakibatkan bakal makin efektif untuk memangkas berlangsungnya kecurangan pelaporan keuangan hingga keilmuan keuangan Komite Audit yang dinilai melalui pengungkapan kecurangan laporan keuangan punya pengaruh signifikan kepada kecurangan laporan keuangan.

Pada tahun 2006, Chen et al. melakukan penelitian mengenai kecurangan akuntansi di China serta mengaitkan kecurangan pada variabel kepemilikan. Struktur kepemilikan mampu mempengaruhi jalannya perusahaan, dimana hal tersebut berpengaruh terhadap kinerja suatu perusahaan. Koh (2003) mengemukakan mengenai di perusahaan di Australia yang memiliki kepemilikan institusional yang besar dapat mendesak tata kelola laba yang agresif oleh perusahaan, yang mana kepemilikan institusional berperan selaku metode *corporate governance*.

Roberts dan Yuan (2009) yang menandakan mengenai kepemilikan institusional yang tinggi bisa mempersembahkan dorongan supaya melaksanakan pemeriksaan atau pengamatan yang makin cermat kepada prestasi kerja manajemen hingga kemungkinan manajemen agar melangsungkan kecurangan terhadap laporan keuangan bakal makin kecil. Keadaan tersebut disebabkan keperluan ekonomi investor institusional jadi makin tinggi untuk entitas itu hingga satu diantara aspek yang punya pengaruh pada monitoring terhadap kinerja manajemen adalah kepemilikan institusional. Sebab demikian, kepemilikan institusional yang semakin

tinggi dalam suatu perusahaan bakal mengurangi kecurangan dalam laporan keuangan.

Pemilihan kecurangan atas laporan keuangan yang jadi objek penelitian dikarenakan laporan keuangan merupakan sumber data krusial yang digunakan untuk mengambil berbagai macam keputusan. Hal ini dikarenakan laporan keuangan bisa mencerminkan kondisi perusahaan, sehingga keterangan yang diberikan oleh laporan keuangan dapat membantu para pemakai laporan. Pihak manajemen menjadikan laporan keuangan sebagai acuan dalam mengevaluasi dan membuat strategi baru perusahaan, dan bagi pihak investor untuk mengetahui perubahan sumber daya ekonomi perusahaan.

Lins dan Warnock (2004) mengatakan mengenai ada dua mekanisme supaya menyelaraskan perihal yang berbeda dari keperluan diantara manajer dan pemegang saham pada bentuk implementasi *corporate governance*, yakni mekanisme eksternal perusahaan serta mekanisme internal. Mekanisme eksternal diproksikan pada kepemilikan institusional, sedangkan mekanisme internal diproksikan pada kepemilikan manajerial yaitu total total rapat komite audit, rapat dewan komisaris.

Berdasarkan fenomena serta gap research, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Peranan *Corporate Governance* dalam Mengurangi Kecurangan Laporan Keuangan”. Riset ini merujuk dari riset terdahulu Priswita (2019) yang memiliki judul Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. Terdapat perihal yang berbeda dari riset ini dengan terdahulunya yakni terletak pada variabel. Dimana penelitian sebelumnya menurut Priswita (2019), menggunakan variabel komite audit untuk memperlihatkan mengenai komite audit yang mempunyai pengaruh kepada kecurangan laporan keuangan, hingga pada riset ini saya mengganti variabel tersebut dengan keahlian keuangan komite audit untuk mengurangi kecurangan laporan keuangan.

I.2 Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang yang telah diuraikan, sehingga rumusan masalah pada penelitian yang di ajukan yaitu seperti berikut :

1. Apakah performa dewan komisaris berpengaruh signifikan dalam mengurangi kecurangan laporan keuangan?
2. Apakah keahlian keuangan komite audit punya pengaruh signifikan dalam mengurangi kecurangan laporan keuangan?
3. Apakah kepemilikan institusional punya pengaruh signifikan dalam mengurangi kecurangan laporan keuangan?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, sehingga tujuan yang ingin diperoleh :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh performa dewan komisaris untuk mengurangi kecurangan laporan keuangan
2. Untuk membuktikan secara empiris keahlian keuangan komite audit berpengaruh dalam mengurangi kecurangan laporan keuangan
3. Untuk membuktikan secara empiris kepemilikan institusional berpengaruh guna mengurangi kecurangan laporan keuangan

I.4 Manfaat Penelitian

Bersumber pada uraian tujuan penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki harapan bisa membagikan manfaat bagi banyak aspek, yaitu:

1. Aspek Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk dikembangkan selanjutnya bagi peneliti lain mengenai kecurangan laporan keuangan.

- b. Memberikan kontribusi pada penelitian sebelumnya dari Priswita (2019) dengan menambahkan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.
2. Aspek Praktis
 - a. Bagi *stakeholder*, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kecurangan laporan keuangan sebagai solusi untuk mengurangi perilaku manajer yang dapat merugikan *stakeholder* itu sendiri.
 - b. Bagi masyarakat atau calon investor, penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang masalah keagenan antara manajer dengan investor, sehingga faktor tersebut dapat dijadikan penentu pengambilan keputusan dalam menanamkan modalnya pada perusahaan yang dituju.
 - c. Bagi perusahaan, penelitian ini bisa memberi manfaat terhadap pertimbangan manajer untuk melakukan aktivitas serta keputusan untuk operasi perusahaan agar tidak merugikan *stakeholder*.